Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Muhammad Ulul Fahmi¹, Nasrulloh²,

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia¹²

ululfahmi.lawyer@gmail.com.¹ nasrulloh.said@gmail.com₂

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No : 4 2024 Halaman : 74-80	<p><i>The issue of child custody out of wedlock is a complex legal issue in Indonesia, both from the perspective of positive law and Islamic law. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection provides a legal basis for protecting children's rights, including those born out of wedlock. Meanwhile, in Islamic law, child custody (hadanah) is based on the principle of child protection and welfare, taking into account their physical and psychological needs. This study aims to examine child custody out of wedlock according to Islamic law and its relation to the provisions of the Child Protection Law. This study uses a literature review method by collecting data related to the regulation of child custody out of wedlock in both legal systems. The results of the study show that in Islamic law, children born out of wedlock have the right to protection and care, with priority custody given to the mother up to a certain age, while the father is obliged to provide maintenance. On the other hand, the Child Protection Law guarantees equal rights for all children regardless of their parents' marital status, including custody, education, and protection from violence. Although there are differences in the division of obligations and custody between mothers and fathers, both legal systems are aligned in upholding the best interests of the child. Therefore, synergy is needed between Islamic law and positive law to ensure the protection of the rights of children outside marriage, especially in terms of care that focuses on the welfare of the child.</i></p>
Keywords: Custody Islamic Law Child Protection	

Abstrak

Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak anak, termasuk mereka yang lahir di luar pernikahan sah. Sementara itu, dalam hukum Islam, hak asuh anak (hadanah) berlandaskan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik dan psikologisnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji hak asuh anak di luar nikah menurut pandangan hukum Islam dan kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kajian Pustaka dengan mengumpulkan data terkait pengaturan hak asuh anak di luar nikah dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah berhak atas perlindungan dan pengasuhan, dengan prioritas hak asuh diberikan kepada ibu hingga usia tertentu, sedangkan ayah berkewajiban memberikan nafkah. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak setara bagi semua anak tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka, meliputi hak asuh, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian kewajiban dan hak asuh antara ibu dan ayah, kedua sistem hukum ini memiliki keselarasan dalam menjunjung kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan perlindungan hak anak di luar nikah, terutama dalam hal pengasuhan yang berfokus pada kesejahteraan anak.

Kata Kunci : Hak Asuh, Hukum Islam, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Masalah hak asuh anak yang lahir di luar nikah menjadi perhatian penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Status hukum anak yang lahir di luar ikatan pernikahan menghadirkan tantangan dari sudut pandang hukum keluarga dan perlindungan anak. Pendekatan dalam memahami hukum Islam harus dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip utamanya, yaitu relevansi hukum yang sesuai dengan waktu, tempat, dan kondisi siapapun. (Nasrulloh, 2010) Aturan di Indonesia mengenai

hak asuh anak di luar nikah sering kali menghadapi ketidakselarasan antara hukum positif dan hukum agama, khususnya hukum Islam. Pengaturan hak asuh anak menurut hukum Islam didasarkan pada prinsip perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beragam interpretasi tentang siapa yang memiliki hak atas pengasuhan anak yang lahir di luar nikah. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang sinergis antara hukum Islam dan hukum positif untuk mengatasi perbedaan dalam perlindungan hak asuh anak. (M. Syafi'i, 2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) telah menjamin perlindungan bagi semua anak, termasuk mereka yang lahir di luar nikah, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak dasar mereka. Ketentuan dalam undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak, pendidikan yang memadai, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan penelantaran, tanpa memandang status pernikahan orang tuanya. Meskipun undang-undang memberikan hak asuh kepada kedua orang tua, kenyataannya pelaksanaan hak asuh terhadap anak-anak yang lahir di luar nikah sering kali dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menerapkan prinsip kesetaraan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. (Kemensesneg, 2014)

Hukum Islam menentukan bahwa anak yang lahir di luar nikah kedudukannya bukannya tanpa hak, akan tetapi prinsip dasar dalam hukum Islam adalah setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan, meskipun anak yang dilahirkan adalah bukan dalam pernikahan yang sah. Ketentuan mengenai hak asuh (*hadanah*) dalam hukum Islam memberikan kewajiban pengasuhan terutama pada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, sementara ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah meskipun tidak mendapatkan hak asuh penuh. (A. Q. Al-Bakri, 2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hak asuh anak yang lahir di luar nikah berdasarkan perspektif hukum Islam serta membandingkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Penelitian ini memiliki signifikansi dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dan hukum nasional dapat bekerja sama untuk melindungi hak-hak anak, khususnya yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih baik dan menyeluruh guna memperkuat perlindungan hak anak di Indonesia, dengan fokus pada pengasuhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan kepentingan terbaik anak.

METODE

Metode yang diterapkan pada penulisan ini adalah kajian pustaka (*library research*), yang mana metode ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan hak asuh anak di luar kawin menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setelah mengumpulkan data yang terkait, maka penulis akan melakukan pendalaman dan menumbuhkan temuan-temuan penelitian yang akurat dan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Asuh Anak

Pengasuhan terhadap seorang anak merupakan kewajiban orang tua. Salah satu atau kedua orang tualah yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab di mata hukum untuk menjadi hak asuhnya, baik untuk mengurus, membimbing, dan mengelola kehidupan anak setelah terjadi perpisahan antara kedua orang tua, baik karena perceraian maupun keadaan lainnya. Istilah dalam konteks hukum, hak asuh anak sering disebut dengan *custody* yang mencakup berbagai aspek, seperti pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, moral, hingga perlindungan hukum bagi anak. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap terjamin, meskipun hubungan antara kedua orang tua tidak harmonis atau kurang baik. Oleh karena itu, keputusan terkait hak asuh anak harus

mempertimbangkan kebutuhan emosional, fisik, dan psikologis anak sebagai prioritas utama. (Kemensesneg, 2014)

Hukum positif Indonesia menuangkan pengaturan tentang hak asuh anak ke dalam berbagai aturan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, misalnya, menyebutkan bahwa setelah perceraian, orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan kepentingan anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan pernikahan berakhir, tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada kedua orang tua. (Indonesia, 2012)

Hak asuh anak dapat diberikan kepada salah satu pihak berdasarkan keputusan pengadilan. Penentuan ini umumnya mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kemampuan ekonomi, kestabilan emosi, dan lingkungan tempat tinggal yang mendukung tumbuh kembang anak. Pengadilan di Indonesia juga sering memperhatikan fariabel usia anak. Anak yang berusia di bawah 12 tahun, umumnya hak asuh diberikan kepada ibu dengan alasan anak pada usia tersebut membutuhkan perhatian lebih dari ibu. Namun, ini bukan aturan mutlak karena setiap kasus diputuskan berdasarkan kondisi spesifik.

Hak asuh anak juga melibatkan aspek pengaturan kunjungan bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh. Pengadilan biasanya mengatur jadwal kunjungan ini untuk memastikan anak tetap memiliki hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya. Pentingnya menjaga keterikatan emosional anak dengan kedua pihak sering kali menjadi perhatian utama dalam keputusan semacam ini. (Muslih, 2021)

Aspek lain yang tak kalah penting adalah bagaimana hak asuh anak diterapkan dalam kasus-kasus adopsi atau ketika anak kehilangan kedua orang tuanya. Situasi seperti ini, membutuhkan peran pengadilan yang mana pengadilan akan menetapkan wali atau orang tua pengganti yang dianggap mampu memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Proses ini biasanya melibatkan penilaian yang ketat terhadap kemampuan calon wali dalam memenuhi kebutuhan anak.

Hak asuh anak juga memiliki dimensi internasional, terutama dalam kasus-kasus penculikan anak lintas negara. Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, yang diratifikasi oleh banyak negara, memberikan kerangka hukum untuk memastikan anak dikembalikan ke negara asalnya jika ia dibawa pergi tanpa persetujuan orang tua atau wali yang sah. Dengan demikian, hak asuh anak merupakan isu yang kompleks dan sensitif, yang membutuhkan pendekatan hukum, psikologis, dan sosial secara menyeluruh. Penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan mengenai hak asuh benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan pada konflik antara orang tua atau pihak lain yang berkepentingan. (Rahayu A., 2019)

B. Hak Asuh Anak di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam

Hak asuh anak di luar nikah adalah isu kompleks yang membutuhkan pendekatan mendalam baik dari segi hukum Islam maupun sosial. Hukum Islam mengatur bahwa anak yang lahir di luar nikah dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, kecuali dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pernikahan adalah institusi yang sah dalam Islam untuk membangun keluarga dan menurunkan keturunan. Oleh sebab itu, anak yang lahir tanpa hubungan pernikahan dianggap hanya memiliki nasab kepada ibunya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: *"Anak itu menjadi milik pemilik ranjang, sedangkan bagi pezina adalah batu"* (HR. Bukhari dan Muslim).

Membahas konteks hak asuh, hukum Islam menetapkan bahwa tanggung jawab pengasuhan anak yang lahir di luar nikah sepenuhnya berada pada ibu. Ibu memiliki hak dan kewajiban penuh untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan fisik, pendidikan, dan spiritual. Pendapat ini banyak didukung oleh ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia menentukan bahwa hak asuh anak di luar nikah juga ditekankan kepada ibu, karena hubungan anak dengan ayah biologisnya tidak diakui secara hukum kecuali terdapat pengakuan melalui pernikahan yang sah di hadapan pengadilan.

Namun, dalam situasi tertentu, ayah biologis dapat memiliki kewajiban finansial terhadap anak di luar nikah. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa meskipun anak tidak memiliki

hubungan nasab dengan ayahnya, ada kewajiban moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh ayah biologis untuk mendukung kebutuhan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab terhadap semua makhluk hidup, terutama anak yang tidak berdosa. (Al-Qardawi Yusuf, 2002)

Isu ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pengakuan ayah terhadap anak di luar nikah. Hukum Islam memberikan keterbukaan agar ayah dapat mengakui anak tersebut sebagai anaknya dengan syarat tertentu, misalnya melalui proses istighfar dan taubat atas dosa perzinahan. Namun, pengakuan ini tidak serta-merta memberikan hak asuh kepada ayah biologis. Pengakuan ini lebih diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti nafkah dan warisan, tanpa menyalahi prinsip-prinsip syariat.

Perspektif hukum Islam menentukan hak asuh anak tidak semata-mata didasarkan pada hubungan biologis, tetapi lebih kepada siapa yang mampu memberikan perlindungan, pendidikan, dan kebutuhan anak secara maksimal. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: *"At-Tasharruf'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Mashlahah"* (segala kebijakan terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan). Oleh karena itu, meskipun secara hukum ibu memiliki hak utama, pengadilan syariah dapat mempertimbangkan faktor lain seperti kelayakan dan kemampuan dalam memberikan pengasuhan. (Al-Suyuthi, 1990)

Dewasa ini dalam konteks negara modern, anak di luar nikah menghadapi stigma sosial yang cukup berat. Islam memandang bahwa anak tersebut tidak boleh disalahkan atas perbuatan orang tuanya. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah Al-Isra' ayat 15: *"seseorang tidak akan memikul dosa orang lain"*. Hal ini menjadi dasar bahwa anak di luar nikah harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak lainnya, terutama dalam hal pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang.

Beberapa ulama juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung ibu dan anak di luar nikah. Hukum Islam memiliki konsep *kafalah* atau pengasuhan alternatif yang dapat diterapkan jika ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Konsep ini memungkinkan pihak lain, seperti keluarga ibu atau lembaga sosial, untuk mengambil alih tanggung jawab pengasuhan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.

Aturan di Indonesia mengenai anak di luar nikah juga terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan putusan ini, dinyatakan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi modern seperti tes DNA. Meski demikian, dalam perspektif hukum Islam, putusan ini masih menjadi perdebatan karena dianggap bertentangan dengan prinsip nasab dalam syariat.

Hak asuh anak di luar nikah juga harus mempertimbangkan aspek psikologis anak. Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua secara utuh berisiko menghadapi gangguan emosional. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan akhlak yang baik bagi anak, bahkan jika anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah. Lingkungan pengasuhan yang sehat dan Islami menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan anak.

Pada intinya, hak asuh anak di luar nikah dalam hukum Islam lebih banyak diberikan kepada ibu karena hubungan nasab yang hanya diakui melalui pihak ibu. Namun, tanggung jawab ayah biologis tetap ada dalam bentuk moral dan finansial. Setiap pengaturan hak asuh, prinsip kemaslahatan anak harus menjadi pertimbangan utama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan ajaran Islam. (Hidayat, 2015)

C. Hak Asuh Anak di Luar Nikah Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Hak asuh anak di luar nikah diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mendefinisikan anak di luar nikah sebagai anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah. Prinsip utama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah bahwa semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka, berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar mereka secara setara. Hal ini tercermin dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, tanpa

diskriminasi. Prinsip ini menegaskan pentingnya perlindungan universal bagi semua anak, termasuk mereka yang lahir di luar nikah.

Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka. Namun, dalam kasus anak yang lahir di luar nikah, tanggung jawab ini lebih dominan berada pada ibu biologis. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Aturan ini tetap relevan dan mendukung prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai dengan hubungan hukum yang diakui.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan landasan penting dalam hal non-diskriminasi terhadap anak di luar nikah. Pasal 13 undang-undang ini melarang perlakuan diskriminatif terhadap anak dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, anak di luar nikah berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan anak-anak lain. Hak ini mencakup pendidikan, kesehatan, dan hak untuk hidup dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.

Hak asuh anak di luar nikah tidak hanya berhubungan dengan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya, tetapi juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak harus didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menekankan bahwa siapapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, baik ibu biologis maupun pihak lain, harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan anak. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan perlindungan anak secara menyeluruh agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.

Hukum positif Indonesia dalam situasi tertentu memberikan ruang bagi ayah biologis anak di luar nikah supaya dapat bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, terutama jika ia mengakui anak tersebut. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui mekanisme hukum seperti pencatatan pengakuan anak di kantor catatan sipil. Jika pengakuan tersebut telah dilakukan, maka ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi anak, termasuk anak di luar nikah. Pasal 20 menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak di luar nikah tidak menjadi korban stigma sosial atau perlakuan diskriminatif.

Hak asuh anak di luar nikah juga dapat melibatkan pihak ketiga jika ibu biologis dianggap tidak mampu atau tidak layak untuk mengasuh anak tersebut. Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tuanya memiliki hak untuk diasuh oleh keluarga terdekat atau pihak lain yang dianggap mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak. Keputusan ini harus berdasarkan kepentingan terbaik anak dan dilakukan melalui proses hukum yang sesuai.

Dalam kaitannya dengan penegakan hak-hak anak di luar nikah, undang-undang ini juga memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar atau mengabaikan hak anak. Pasal 77A menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa anak di luar nikah tetap mendapatkan haknya, termasuk dari ayah biologisnya yang telah mengakui anak tersebut.

Selain itu, Pasal 21 undang-undang ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak, termasuk anak di luar nikah. Masyarakat dapat berperan dengan memberikan dukungan moral, sosial, dan material kepada ibu dan anak yang membutuhkan. Partisipasi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, terutama mereka yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah berhak mendapatkan perlindungan yang sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah.¹ (Kemensesneg, 2014) Undang Undang ini menekankan hak asuh anak untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran, tanpa memandang status orang tuanya. (D.S. Sulistyowati, 2015)

Pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak asuh dan hak-hak lainnya bagi anak di luar nikah. Status ibu biologis dalam undang-undang ini memiliki peran utama dalam pengasuhan anak, namun negara dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh, sehingga hak-hak anak tetap terjamin.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai hak asuh anak di luar nikah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak, termasuk anak di luar nikah, merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, negara, dan masyarakat. Undang-undang ini memiliki penekanan utama bahwa kepentingan terbaik anak yang mencakup perlakuan tanpa diskriminasi, pemenuhan hak dasar, dan perlindungan hukum yang setara.

Hak asuh anak di luar nikah, sebagaimana diatur dalam undang-undang, secara hukum lebih banyak melekat pada ibu biologis karena anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, kecuali terdapat pengakuan dari ayah biologis. Pengakuan ini dapat memberikan kewajiban finansial kepada ayah biologis untuk memenuhi kebutuhan anak. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum yang setara kepada semua anak, tanpa membedakan status kelahiran mereka. Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap anak, termasuk yang lahir di luar nikah, berhak mendapatkan hak asuh, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Undang-Undang ini juga mengatur bahwa kedua orang tua, baik yang sah maupun tidak sah dalam pernikahan, bertanggung jawab untuk memberikan pengasuhan yang baik dan memenuhi kebutuhan hidup anak.

Asas non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak yang diatur dalam undang-undang menjadi landasan penting dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak, termasuk mekanisme pengasuhan oleh pihak ketiga jika ibu dianggap tidak mampu. Sanksi tegas juga diberikan kepada pihak yang lalai dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap anak.

Pada akhirnya, undang-undang ini tidak hanya melindungi hak-hak anak, tetapi juga memberikan panduan untuk menjaga keharmonisan antara orang tua dan anak meskipun hubungan pernikahan orang tua tidak sah. Prinsip perlindungan anak ini sejalan dengan nilai-nilai universal tentang keadilan, kesejahteraan, dan non-diskriminasi, sehingga menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil.

Masalah hak asuh anak yang lahir di luar nikah merupakan isu yang kompleks yang melibatkan pertemuan antara nilai-nilai agama, hukum nasional, dan norma sosial. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hak untuk diasuh dan dilindungi. Hukum Islam memberikan hak asuh kepada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, dengan ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah meskipun tidak memiliki hak asuh penuh atas anak tersebut. Prinsip utama dalam hukum Islam adalah kesejahteraan anak, yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas dalam pengasuhan.

Meskipun terdapat kesenjangan antara hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal penetapan hak asuh, kedua sistem hukum ini sepakat bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang terbaik. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menciptakan sinergi antara kedua sistem hukum ini dalam rangka memastikan pemenuhan hak-hak anak, terutama

dalam hal pengasuhan anak yang lahir di luar nikah, yang pada akhirnya mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak.

Negara berperan penting dalam memastikan bahwa setiap anak, termasuk yang lahir di luar nikah, mendapatkan akses terhadap kehidupan yang layak. Prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan perlindungan ini.

Hak asuh anak di luar nikah biasanya berada pada ibu biologis, tetapi tanggung jawab ayah biologis dapat dikenakan dalam bentuk pengakuan dan dukungan finansial, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi oleh sistem hukum Indonesia.

Pada akhirnya, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap keputusan terkait hak asuh harus mengutamakan kesejahteraan anak, serta melibatkan peran aktif dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka.

REFERENCES

- A. Q. Al-Bakri. (2012). *Fiqh al-Awlaad: Kajian Fiqh Hadanah dalam Islam*. Jakarta Pelajar.
- Al-Qardawi Yusuf. (2002). *Fiqh al-Zakah*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Suyuthi, J. (1990). *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- D.S. Sulistyowati. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia*. Mandar Maju.
- Hidayat, A. (2015). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Islam.
- Indonesia, R. (2012). *Undang undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan*. 1–5.
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- M. Syafi'i. (2011). *Hukum Keluarga Islam*. Raja Grafindo.
- Muslih, M. (2021). Aspek Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Sosial Dan Hukum*.
- Nasrulloh, N. (2010). Maqasid Shari'Ah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2970>
- Rahayu A. (2019). Kepentingan Terbaik Anak dalam Perspektif Hukum dan Psikologi. *Jurnal Psikologi Dan Hukum*.